

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Hasil Penelitian dan Tulisan Lainnya.

Aditjondro, George Junus. 2003. *Korban-korban Pembangunan: Tilikan Terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

———. 2003. *Kebohongan-Kebohongan Negara: Perihal Kondisi Obyektif Lingkungan Hidup di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Amal, Ichlasul. 1996. "Pengantar," dalam Ichlasul Amal (ed.), *Teori-teori Muktahir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

———. 1993. *Perwakilan Politik dan Wakil Rakyat*. Laporan Penelitian FISIPOL UGM.

Amal, Ichlasul dan Panggabean, Samsurizal. 1996. "Reformasi Sistem Multipartai dan Peningkatan Peran DPR dalam Proses Legislatif," dalam Ichlasul Amal (ed.), *Teori-teori Muktahir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

———. 1996. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia.

Budiyarso. Edy 2000. *Menentang Tirani: Aksi Mahasiswa '77/'78*. Jakarta: Grasindo.

Cipto, Bambang. 1996. *Prospek dan Tantangan Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Crouch, Harold. 1978. *Masyarakat Politik dan Perubahan, Bagian I (terj.)*. Jakarta: Pusat Studi Politik Indonesia.

Devas, Nick 1989. "Pajak Daerah: Kemungkinan Untuk Pembaharuan," dalam Devas, Nick., Binder, Brian., Booth, Anne., Devey., Kenneth., dan Kelly, Roy. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (terj.)*. Jakarta: Penerbit UI-Press.

Duverger, Maurice. 1961. *Teori dan Praktek Suatu Negara (terj.)*. Jakarta: Pustaka Rakyat.

———. 1996. "Asal Mula Partai Politik," dalam Ichlasul Amal (ed.), *Teori-teori Muktahir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana

- Dwiyanto, Agus et.al., 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Eko, Sutoro. 2003. *Transisi Demokrasi Indonesia: Runtuhnya Rezim Orde Baru*. Yogyakarta: APMD Press.
- Gaffar, Afan. 2002. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gie, The Liang. 1993. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia - Jilid I*. Yogyakarta: Liberty.
- Gooch, R.K. 1947. *The Government of England*. New York: D. Van Norstrand Company, Inc.
- Harris, Joseph P. 1937. "Election", dalam Seligman, Edwin, R. A. *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. 5. New York: The Macmillan Company.
- Imawan, Riswandha. 1993. "Faktor-faktor Yang Menghambat Usaha Optimasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," dalam Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong (ed.), *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
- Hague, Rod, Harrop, Martin dan Breslin, Shawn. 1998. *Comparative Government and Politics: An Introduction*. London: Macmillan Press.
- H.R., Syaukani, Gaffar, Afan dan Rasyid, Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaho, Josef Riwu. dan Ala, Andre Bayo. 1993. *Pelaksanaan Fungsi DPRD Tingkat II: Tinjauan Hubungan Legislatif dan Eksekutif di Daerah Tingkat II*. Laporan Penelitian FISIPOL UGM.
- Lay, Cornelis. *Tantangan Domestik dan Internasional DPRD, Catatan Pengantar "Orientasi Anggota DPRD Se-Eks Karesidenan Banyumas," Baturaden 19 - 22 Januari 2000*. <http://www.pesisir.com/indonesia/1/11.htm>

Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos). *Menuju Agenda Demokrasi Berbasis-HAM Yang Lebih Bermakna - Kesimpulan Awal Survei Nasional Tahap 1 dan 2 Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan Demokratisasi di Indonesia (Laporan Eksekutif)*, 20 Januari 2005. <http://www.demos.or.id/riset.demokrasi/Eksekutif%20Report%20-Indonesia-%20versi%2017%20Feb%2005.pdf>.

Macridis, Roy C. 1996. "Pengantar Sejarah, fungsi dan Tipologi Partai-partai," dalam Ichlasul Amal (ed.), *Teori-teori Muktahir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Marbun, B.N. 1993. *DPRD: Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*. Jakarta: Erlangga.

———. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Sinar Harapan.

Maschab, Mashuri. 1992. *Pemerintahan Desa di Indonesia*. "Diktat Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Desa." Jurusan Ilmu Pemerintahan. FISIPOL UMY. Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

Mas'oed, Mohtar. *Perbandingan Sistem Pemilu*. Catatan Kuliah "Sistem Kepartaian dan Pemilu," Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UMY.

Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nawawi, H. Hadari dan Hadari, H. Martini. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Normalina, Vivien. 2003. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh DPRD Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Banjarnegara Akhir Tahun 2002*. Skripsi FISIPOL UMY.

Notosusanto, Nugroho. 1985. *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*. Jakarta: Balai Pustaka.

Olson, David M. 1994. *Democratic Legislative Institutions: A Comparative View*. Armonk, New York: M. E. Sharpe.

Pitkin, Hannah Penichel. 1967. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.

Purwaningsih, Titin. 2003. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Fungsi DPR R.I dan DPRD*. Catatan Kuliah "Proses Legislatif." Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY.

- Ratnawati. 1996. *Perwakilan Politik Badan Legislatif Tingkat Daerah*. Laporan Penelitian FISIPOL UGM.
- Reynolds, Andrew. 2001. "Merancang Sistem Pemilihan Umum," dalam Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (ed.), *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar Dari Kekeliruan Negara-negara Lain*. Bandung: Mizan, LIPI dan Ford Foundation.
- Sanit, Drs. Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Very Zukhdi. 2002. *Peran DPRD dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2001-2006*. Skripsi FISIPOL UMY.
- Saragih, Bintan R. 1985. *Sistem Pemerintahan dan Lembaga perwakilan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Perintis Pers.
- Sartori, Giovanni. 1972. "Representation Systems," dalam Sills, David L. *International Encyclopedia of the Social Sciences, vol 13 dan 14*. New York: The Macmillan Company & The Free Press.
- Schoorl, J.W. 1998. *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang (terj.)*. Jakarta: Gramedia.
- Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta. 1997. *Memori Pengabdian DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Periode 1992-1997*. Yogyakarta: Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta.
- . 1999. *Memori Pengabdian DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Periode 1997-1999*. Yogyakarta: Sekretariat DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta.
- . 2004. *Memori Pengabdian DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004*. Yogyakarta: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.
- Shah, Anwar. 2000. "Indonesia dan Pakistan: Desentralisasi Fiskal: Tekad Atau Retorika?," dalam Bird, Richard M. dan Vaillancourt, Francois (ed.). *Desentralisasi Fiskal di Negara Berkembang (terj.)*. Jakarta: Gramedia.
- Sidik, Machfud. 2002. "Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)." makalah seminar nasional "Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah" yang diselenggarakan Program S-2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta

Sidik, Machfud., Mahi, B. Raksaka., Simanjuntak, Robert., Brodjonegoro, Bambang. (ed.). 2002. *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Kompas.

SMERU. 2002. *"Mencari Alternatif Penyempurnaan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Beberapa Pelajaran dari Daerah (Hasil Penelitian)."* Disampaikan pada Workshop: "Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Publik dalam Perspektif Lokal", Kerjasama LIPI dan SMERU Memperingati HUT LIPI ke-35: Jakarta.

Soehino. 2002. *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*. Yogyakarta: Liberty.

Strong, C.F. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia (terj.)*. Bandung: Penerbit Nuansa & Penerbit Nusamedia.

Suhelmi, Ahmad. 2001. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia.

B. Surat Kabar

Kedaulatan Rakyat, 30 Desember 1999.

Kompas, 24 Maret 2006.

Tempointeraktif, 27 Mei 2005.

C. Peraturan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum Atas Jalannya Pemeriksaan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Menteri Dalam Negeri.

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman pelaksanaan Pengawasan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keputusan DPRD Kodya Dati II Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/1992 tanggal 29 September 1992 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kodya Dati II

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta.

Keputusan DPRD Kodya Dati II Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1997 tanggal 6 Mei 1997 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kodya Dati II Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor: 3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta.

Keputusan DPRD Kota Yogyakarta Nomor: 3/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Bahan-Bahan yang Tidak Diterbitkan

Risalah Sidang-sidang DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1992-1997.

Risalah Sidang-sidang DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta Periode 1997-1999.

Risalah Sidang-sidang DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Tanya-Jawab Dengan Ketua DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004.

Lampiran 2: Tanya-Jawab Dengan Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 1997-1999 dan 1999-2004.

Lampiran 3: Tanya-Jawab Dengan Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta Periode 1999-2004.

Lampiran 4: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Cara Pengawasan Umum Atas Jalannya Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri.

Lampiran 5: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Presiden Rrepublik Indonesia.

Lampiran 6: Surat Keterangan Bimbingan Skripsi.

Lampiran 7: Berita Acara Ujian Proposal.

Lampiran 8: Surat Keterangan Izin Penelitian (Tembusan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta).

Lampiran 9: Surat Keterangan Uji Melaksanakan Penelitian di DPRD Kota